

# Keuangan RSUD Tak Jelas

Tercatat piutang RSUD-EF kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 40 miliar. Tapi, pihak BPJS menampik ada tagihan.



SUASANA pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan, Batam.

**R**IKY Indrakari menilai administrasi keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD-EF) amburadul. Pada 2017, terdapat piutang di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 40 miliar, yang belum dicairkan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, itu berang.

Dijelaskan Riky Indrakari, sumber anggaran di RSUD-EF pada 2017, sebesar Rp 98.877.028.827. Hal itu, tergabung antara APBD

sebesar Rp 16.009.213.130 dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp 80.000.000.000. Tapi, capaian di BLUD hanya Rp 65 miliar.

"Tren pertumbuhan tiga tahun terakhir, BLUD masih sama. Lalu, piutang BPJS dari Rp55 miliar, juga baru terbayar Rp 15 miliar," kata Riky, Selasa (24/4).

Riky melanjutkan, piutang Rp 40 miliar tersebut, terancam hangus, jika RSUD tak segera menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan adanya tenggat waktu untuk

RSUD dalam mencairkan piutang sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes).

"Sayang sekali kalau hangus. Tapi kita akan cek lagi dengan RSUD dan BPJS," kata Riky.

Riky menganggap, administrasi keuangan di RSUD masih sangat buruk. Hal ini, kata dia, bakal merugikan bidang pelayanan yang lain.

Pada hal, jika piutang ini cair, pelbagai permasalahan di RSUD seperti obat, insentif jasa medis, bahkan alat kesehatan, bisa selesai.

"Perlu adanya rotasi dari pimpi-

nan. Jika memang beban kerja berlebihan, rotasi saja. Kalau kurang, ya, berikan pelatihan supaya pelayanan tetap prima," katanya.

Jika memang piutang tak bisa dicairkan karena masalah obat, harusnya RSUD bisa memaksimalkan anggaran BLUD, karena anggaran tersebut bebas digunakan. Berbeda dengan DAK dan APBD yang diposting khusus, anggaran BLUD ini merupakan anggaran dari dan untuk RSUD.

"Kalau dilihat, sebenarnya gampang. Hanya perlu transparansi

saja," katanya.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan Komunikasi Publik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam, Irfan Rachmadi, mengelak bahwa BPJS berutang ke RSUD-EF sebesar Rp 40 miliar.

Pasalnya, BPJS menganggap utang dari rumah sakit, jika sudah ada surat klaim yang diajukan. Dan masalah di RSUD, BPJS mengaku tak pernah menerima klaim di BPJS.

"Nggak ada saya rasa. Harus saya konfirmasi dulu. Dari mana informasinya? Di kami gak ada rasanya. Karena kami menganggap utang ketika ada tagihan masuk," katanya.

Untuk tenggat waktu, Irfan mengatakan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kadaluarsa Klaim Kolektif Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan adalah 2 tahun setelah pelayanan diberikan.

"Kalau belum masuk ya belum kita anggap utang. Itu masih masalah internal RSUD. Kalau mereka dasarnya menganggap utang apa? Kalau kami setiap ada tagihan dari RSUD, harus ada berita acara," katanya.

Sementara tagihan yang dimasukkan di BPJS, harus memenuhi tiga unsur paket, dan salah satunya yakni tagihan obat. Dalam klaim, tagihan obat harus disertakan, karena BPJS sudah memasukkan ke dalam paket pembayaran.

"Kalau 2017 sudah ada pembayaran. Besarannya nggak hafal," pungkasnya. (ikdl/ faiz)